

**<ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK DAN  
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK : ANALISIS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR  
130/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM=**

Oleh

Azriel Muhammad Zakkiy Alawiy, NIM 2214101148  
Program Studi Ilmu Hukum

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang mengabulkan pembatalan pengangkatan anak atas gugatan orang tua angkat, serta akibat hukum pembatalan tersebut terhadap kedudukan keperdataan anak angkat. Isu hukum penelitian bertolak dari kekosongan norma (*rechtsvacuum*) mengenai keberlakuan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) pada perbuatan hukum pembatalan pengangkatan anak: hukum positif hanya mewajibkan pengangkatan anak didasarkan pada kepentingan terbaik anak, tanpa mengatur bahwa pembatalannya juga tunduk pada asas yang sama. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui penalaran hukum kritis dengan merekonstruksi *ratio decidendi* putusan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pertimbangan hakim bertumpu pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa menguji kepentingan terbaik anak sebagaimana diwajibkan Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga putusan tidak didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Diukur dengan standar mengadili berbasis perlindungan anak yang dikembangkan Mahkamah Agung, putusan tersebut mengalami defisit metodologis karena tidak melakukan penilaian multidimensi dan tidak mendengar pendapat anak. Kedua, pembatalan menimbulkan ketidakpastian status keperdataan anak karena amar putusan tidak menegaskan keberlakuan *ex tunc* atau *ex nunc*, tidak mengatur hak waris dan nafkah yang telah timbul, serta tidak membebaskan tanggung jawab residual kepada orang tua angkat. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi pertimbangan hukum yang seharusnya ditempuh hakim serta pembaruan regulasi yang menegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak wajib didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan berlaku *ex nunc*.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Pengangkatan Anak, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Ratio Decidendi, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim

**<LEGAL ANALYSIS OF THE ANNULMENT OF CHILD ADOPTION  
AND ITS LEGAL CONSEQUENCES ON THE CHILD'S STATUS : AN  
ANALYSIS OF EAST JAKARTA DISTRICT COURT DECISION  
NUMBER 130/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM=**

By  
Azriel Muhammad Zakkiy Alawiy, NIM 2214101148  
Legal Studies Program

**ABSTRACT**

This study analyses the legal reasoning of the judges in East Jakarta District Court Decision Number 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, which granted the annulment of an adoption upon the adoptive parent's claim, and examines the legal consequences of that annulment for the child's civil status. The core legal issue is a normative vacuum (*rechtsvacuum*) concerning the applicability of the best interest of the child principle to adoption annulment: positive law requires that adoption be grounded in the child's best interest, yet no provision affirms that annulment must likewise be grounded in that principle. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, analysed prescriptively through a legal critical thinking framework by reconstructing the decision's ratio decidendi. The findings show, first, that the judges' reasoning rests on Article 1365 of the Civil Code and Article 46 of Law Number 1 of 1974, without examining the child's best interest as required by Articles 2 and 39 of Law Number 35 of 2014, so the decision was not grounded in that principle. Measured against the child-protective adjudication standards developed by the Supreme Court, the decision suffers a methodological deficit for failing to conduct a multidimensional assessment and to hear the child. Second, the annulment creates legal uncertainty because the verdict does not determine whether it operates *ex tunc* or *ex nunc*, does not address accrued inheritance and maintenance rights, and imposes no residual responsibility on the adoptive parent. The study proposes a model of judicial reasoning that ought to be adopted and recommends regulatory reform affirming that annulment must be grounded in the child's best interest and take *ex nunc* effect.

Keywords: Adoption Annulment, Best Interest of the Child, Ratio Decidendi, Legal Consequences, Decision Number 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim